



PEMERINTAH KAB MAROS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**LAKIP
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/tiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2016-2021. LAKIP Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2016-2021).

LAKIP Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Maros disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018. Penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda. Komitmen dalam penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Maros, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Maros untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LAKIP Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Bappeda Kabupaten Maros. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek Akuntabilitas Kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Maros pada Tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LAKIP Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih.

Maros, 18 Januari 2021



MUHAMMAD ALWI, M.Si
Rangkat Pembina Utama Madya
NIP. : 196812231995031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Bappeda untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Bappeda untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2020 berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran OPD dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIP ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2020 telah berhasil dicapai. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda ke depan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I
Latar Belakang	I.1
Maksud Dan Tujuan	I.2
Gambaran Umum Organisasi.....	I.3
Aspek Strategis	I.4
Struktur Organisasi.....	I.5
Penentuan Isu-Isu Strategis	I-6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II
Rencana Strategis	II.1
Perjanjian Kinerja	II.2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III
Capaian Kinerja Organisasi.....	III.1
Target Dan Realisasi Tahun Rencana	III.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja	III.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini.....	III.1.3
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	III.1.4
Analisis Penggunaan Sumberdaya	III.1.5
Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan.....	III.1.6
Realisasi Anggaran	III.2
BAB IV PENUTUP	V

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2020.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen stratejik yang menempatkan organisasi pada titik yang stratejik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan aplikasi manajemen stratejik di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilisasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan didalam rencana stratejik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan

yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros, Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.3.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Maros mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN, KOMPOSISI SDM DAN PERLENGKAPAN

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Badan;
- B. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian.
- C. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya dan SDM terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumberdaya Alam;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia.
- D. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Daerah;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi.
- E. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan.

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Maros yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdaya guna. Adapun kondisi sumber daya manusia aparatur Bappeda Kabupaten Maros pada saat sekarang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.3.2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)														
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22	20	42	21	27	48	25	26	51	24	23	47	25	19	44
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	5	4	9
4	Magang	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		26	26	52	25	31	56	29	30	59	28	23	55	30	23	53

(Sumber Data : Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian Bappeda)

Tabel 1.3.2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT ASN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)														
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	GOLONGAN I (Juru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. I A (Juru Muda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. I B (Juru Muda Tk.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. I C (Juru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. I D (Juru Tk.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GOLONGAN II (Pengatur)															
	1. II A (Pengatur Muda)	-	-	-	1	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-
	2. II B (Pengatur Muda Tk. I)	1	3	4	2	3	5	1	-	1	3	1	4	3	1	4
	3. II C (Pngatur)	2	-	2	1	-	1	3	3	6	1	1	2	1	-	1
	4. II D (Pengatur Tingkat I)	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1
3	GOLONGAN III (Penata Muda)															
	1. III A (Penata Muda)	5	2	7	5	3	8	5	2	7	5	3	8	3	2	5
	2. III B (Penata Muda Tk. I)	4	7	11	6	4	10	7	1	8	4	3	7	6	1	7
	3. III C (Penata)	3	6	9	1	10	11	2	9	11	5	7	12	6	5	11
	4. III D (Penata Tk.I)	2	3	5	2	4	6	2	7	9	2	6	8	3	7	10

4	GOLONGAN IV (Pembina)															
	1. IV A (Pembina)	1	1	2	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	3	3
	2. IV B (Pembina Tk.I) Tk I)	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	3. IV C (Pembina Utama Muda)	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	4. IV D (Pembina Utama Madya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. IV E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		20	22	43	20	28	48	25	26	51	23	24	47	25	19	44

(Sumber Data : Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian Bappeda)

Tabel 1.3.2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)														
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	STRUKTURAL	5	11	15	4	12	16	4	12	16	3	13	16	4	11	16
	1. ESELON II B	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	2. ESELON III A	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	3. ESELON III B	2	2	4	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3
	4. ESELON IV A	1	9	10	2	9	11	2	9	11	1	10	11	3	8	11
	5. ESELON IV B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNGSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. FUNGSIONAL TERTENTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. FUNGSIONAL UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		5	11	16	4	12	16	4	12	16	4	12	16	4	11	16

(Sumber Data : Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian Bappeda)

Tabel 1.3.2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Kabupaten Maros
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)														
		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	Strata Dua (S2)	5	6	11	3	6	9	3	6	9	2	5	7	5	8	13
3	Strata Satu (S1)	12	14	25	15	15	30	15	15	30	16	17	33	15	10	25
4	Diploma Tiga (D III)	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1
5	Diploma Dua (D II)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6	SMA/SMK/ Sederajat	2	3	5	2	1	3	6	4	10	4	1	5	4	1	5
7	SMP/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		19	24	43	20	23	43	25	26	51	24	23	47	25	19	44

(Sumber Data : Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian Bappeda)

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros :

Tabel 1.3.2.5
Daftar Peralatan Dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Maros

NO.	NAMA ASSET	TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		Jumlah	Satuan	Kondisi		Jumlah	Satuan	Kondisi		Jumlah	Satuan	Kondisi		Jumlah	Satuan	Kondisi		Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Buruk			Baik	Buruk			Baik	Buruk			Baik	Buruk				
1.	Kendaraan Dinas/ Operasional	4	Unit	15	1	16	Unit	15	1	16	Unit	15	1	16	Unit	15	1	13	Unit	11	2
	Mobil	2	Unit	1	1	3	Unit	2	1	3	Unit	2	1	3	Unit	2	1	3	Unit	2	1
	Motor	2	Unit	14	-	13	Unit	13	-	13	Unit	13	-	10	Unit	9	1	10	Unit	9	1

2.	Kursi Tamu	3	Set	3	-	3	Set	3	-	3	Unit	1	2	3	Unit	1	2	1	Unit	1	-
3.	LCD Projector + Attachment	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
4.	Laptop	8	Buah	8	-	8	Buah	8	-	9	Buah	9	-	7	Buah	7	-	8	Buah	8	-
5.	Notebook	4	Buah	4	-	6	Buah	6	-	6	Buah	6	-	4	Buah	4	-		Buah		
6.	Komputer PC	6	Buah/set	6	-	14	Buah	14	-	18	Buah	18	-	9	Buah	9	-	2	Buah	2	-
7.	Faximile/ Telephone	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
8.	Rak Besi/ Metal	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
9.	Whiteboard	2	Buah	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
10.	Meja Kerja Eselon II	2	Buah	2	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-
11.	Meja Kerja Eselon III	-	-	-	-	10	Buah	9	1	10	Buah	9	1	10	Buah	9	1	12	Buah	11	1
12.	Meja Kerja Eselon III (1 biro)	5	Buah	5	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
13.	Meja Kerja Eselon IV	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-	9	Buah	9	-
14.	Meja Kerja Eselon IV (1/2 Biro)	-	-	-	-	17	Buah	-	17	17	Buah	17	-	17	Buah	17	-	15	Buah	15	-
15.	Kursi Kerja Eselon II	1	Buah	2	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-
16.	Kursi Kerja Eselon III	5	Buah	5	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	4	Buah	4	-
17.	Kursi Kerja Eselon IV	7	Buah	7	-	17	Buah	17	-	17	Buah	17	-	17	Buah	17	-	12	Buah	12	-
19.	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	-	-	-	-	27	Buah	27	-	27	Buah	27	-	27	Buah	27	-	23	Buah	23	-
20.	Meja Rapat (R. Rapat)	5	Buah	5	-	10	Buah	10	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
21.	Meja Tulis	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
22.	Meja Tulis (1 Biro)	10	Buah	10	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	1	Buah	1	-
23.	Meja Tulis (1/2 Biro)	3	Buah	3	-	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-
24.	Meja biro	44	Buah	44	-	20	Buah	20	-	6	Buah	6	-	6	Buah	6	-	6	Buah	6	-
25.	Meja Biro (1/2)	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-	14	Buah	14	-	14	Buah	14	-	14	Buah	14	-

26.	Brand kas	1	Buah	1	-	-	Buah	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	Buah	-	-
27.	Lemari Besi	4	Buah	4	-	4	Buah	4	-	5	Buah	5	-	4	Buah	4	-	3	Buah	3	-
28.	Lemari Kaca	11	Buah	11	-	11	Buah	11	-	11	Buah	11	-	6	Buah	6	-	4	Buah	4	-
29.	Lemari Kayu	2	Buah	2	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	8	Buah	8	-	8	Buah	8	-
30.	Lemari Arsip /Dinamis	5	Buah	5	-	7	Buah	7	-	7	Buah	7	-	5	Buah	5	-	5	Buah	5	-
31.	Lemari Arsip /Lemari Dinamis	-	-	-	-	3	Buah	-	3	3	Buah	2	1	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
32.	Buffet Kayu	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	1	1	2	Buah	1	1	2	Buah	1	1
33.	Filling Besi/Metal	21	Buah	21	-	16	Buah	16	-	16	Buah	16	-	14	Buah	14	-	13	Buah	13	-
34.	Kursi Besi Metal	2	Buah	2	-	47	Buah	47	-	47	Buah	47	-	47	Buah	47	-	47	Buah	47	-
35.	Kursi Rapat	28	Buah	28	-	10	Buah	10	-	10	Buah	10	-	10	Buah	10	-	10	Buah	10	-
36.	Kursi Putar	12	Buah	12	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
37.	Kursi Lipat	24	Buah	24	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-
38.	Sofa	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
39.	Global Positioning System (GPS)	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	-	Buah	-	-
40.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Buah	2	-	1	Buah	1	-	2	Buah	1	1	2	Buah	1	1	1	Buah	1	-
41.	Laminating	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
42.	Microtik, Connector, UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-
43.	Tenda Smart (Wfi Router)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-
44.	Tenda Teg 1024D	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-	-	Buah	-	-	-	Buah	-	-
45.	Dinding Penyekat Partisi	1	Set	1	-	3	Set	3	-	3	Set	3	-	3	Set	3	-	3	Set	3	-
46.	Gordyn	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Set	1	-	1	Set	1	-	2	Set	2	-
47.	AC Split	14	Unit	14	-	13	Unit	13	1	13	Buah	12	1	12	Buah	12	-	17	Buah	17	-
48.	Televisi	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	3	Buah	3	-

49.	Kulkas/ Lemari ES	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-	2	Unit	2	-	2	Unit	2	-	3	Buah	3	-
50.	Printer	17	Buah	17	-	14	Buah	14	-	18	Buah	18	-	17	Buah	17	-	18	Buah	17	1
51.	UPS	6	Buah	6	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-	2	Buah	2	-
52.	Camera Electronic	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	3	-	3	Buah	2	1
53.	Camera Film	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	1
54.	Handy Talky	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	-	1
55.	Wireless Amplifier	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	-	Buah	-	-
56.	Papan Nama Instansi	-	-	-	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	2	Buah	2	-
57.	Meja Resepion	-	-	-	-	1	Set	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-	1	Buah	1	-
58.	Web Kamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-
59.	Kamera CCTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Buah	8	-
60.	Mic Wireles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Buah	16	-
61.	Kursi Rapat Pejabat (R.Kaban)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Buah	5	-
62.	Meja Rapat Pejabat (R.Kaban)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-
63.	Meja Kerja Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Buah	20	-
64.	Lemari Arsip (R. Sek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Buah	2	-
65.	Tempat Cuci Tangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Buah	1	-
66.	Jalan Lingkungan /Halaman	-	-	-	-	1	M2	1	-	1	M2	1	-	1	M2	1	-	1	M2	1	-
67.	Waduk Air Bersih /Air Baku Lain2	1	M2	1	-	1	M2	1	-	1	M2	1	-	1	M2	1	-	1	M2	1	-

(Sumber Data : Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian Bappeda)

1.4. ASPEK STRATEGIS

Eksistensi Bappeda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Maros mempunyai fungsi sebagai berikut:

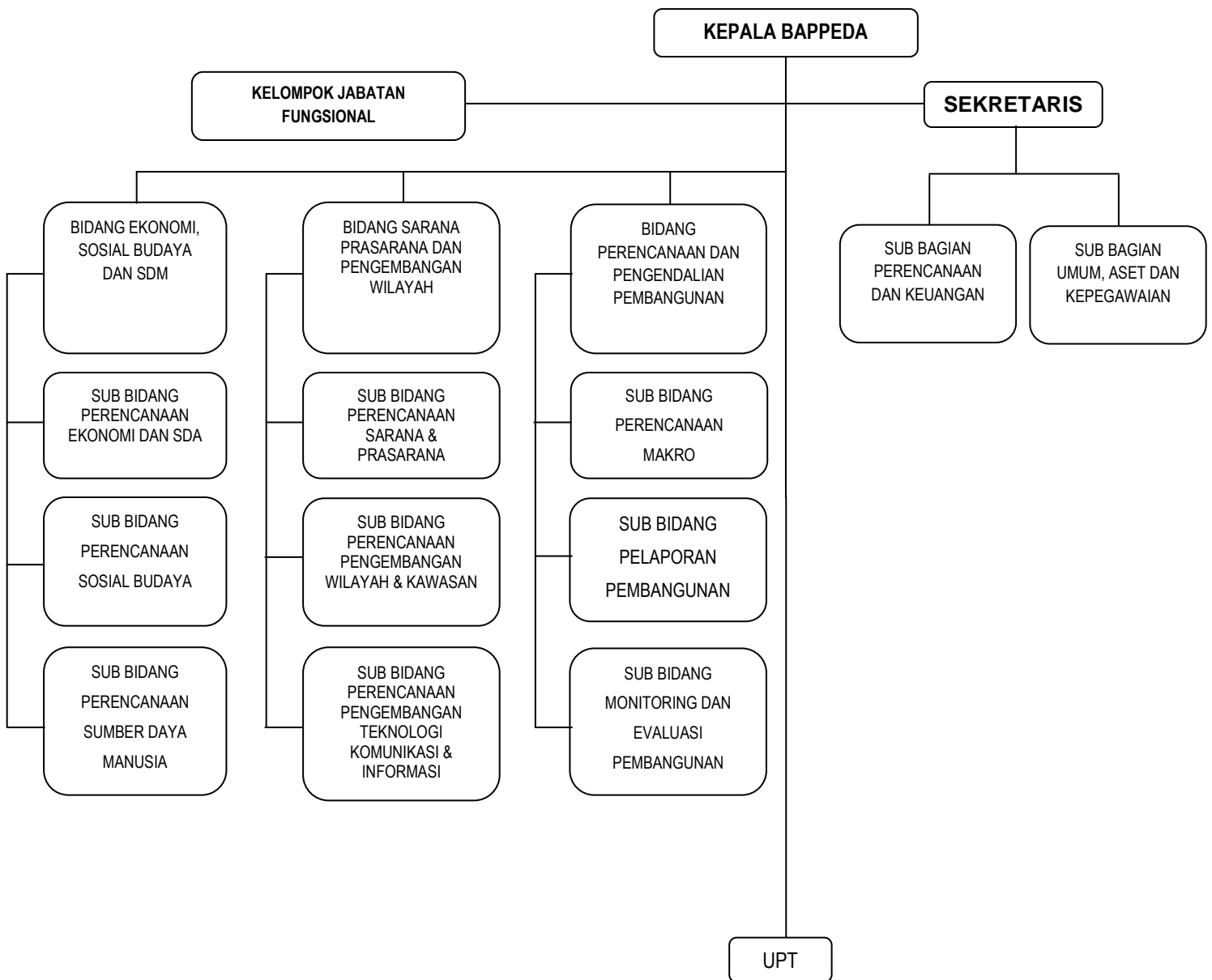
- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Bappeda Kabupaten Maros memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAROS (Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016)



1.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Bappeda serta aspek strategis, maka didapatkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas program dan kegiatan pembangunan daerah

Belum optimalnya kualitas program dan kegiatan pembangunan Daerah merupakan permasalahan yang disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

2. Pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah

Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan merupakan permasalahan yang disebabkan kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

Isu strategis bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode 2016 – 2021. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Maros, yaitu: Maros Lebih Sejahtera 2021, dan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan;
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika.

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Bappeda Kabupaten Maros berkontribusi terhadap misi kedua dalam RPJMD , yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi. Rencana pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dapat dilihat dari:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;

Kebijakan Rencana pembangunan Daerah (dalam bentuk RPJMD dan RKPD) dijabarkan secara terintegrasi, sinkron, dan sinergis antar wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Untuk mewujudkan kontribusi Bappeda Kabupaten Maros terhadap pencapaian misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menyusun struktur kinerja Bappeda Kabupaten Maros untuk periode 2016 – 2021.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda Kabupaten Maros

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN						
			TOLOK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					SATUAN
				1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik Dan Bersih Di Lingkungan Bappeda	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	C	CC	B	BB	A	Nilai SAKIP
			Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"	100	100	100	100	100	Persen
			Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nilai Survey

2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100	100	100	100	100	Persen
			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persen

Untuk melaksanakan dan merealisasikan tujuan dan sasaran tersebut, maka dibutuhkan suatu strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan tersebut dirumuskan dengan cara atau langkah yang bersifat makro dan merupakan suatu tindakan yang diambil dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan OPD.

Berdasarkan hal tersebut maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
1	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik Dan Bersih Di Lingkungan Bappeda	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Kelembagaan Bappeda Yang Baik Dan Bersih	1	Memperkuat Koordinasi Dan Penataan Administrasi Pemerintahan Di Lingkup Bappeda	1	Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Administrasi Pemerintahan Lingkup Bappeda	
						2	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
				2	Meningkatkan Koordinasi Dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program, Dan Kegiatan Lingkup Bappeda	1	Penyusunan Pedoman, Petunjuk Teknis, Dan Sop Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program Dan Kegiatan Lingkup Bappeda	
						2	Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala	
				3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Bappeda		1	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran Bappeda
							2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi Program Serta Anggaran Bappeda
							3	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
							4	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Bappeda
							5	Pembinaan Dan Pengelolaan Urusan Perbendaharaan, Urusan Akuntansi, Urusan Penatausahaan BMD Lingkup Bappeda
							6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan BMD Lingkup Bappeda
				4	Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Sdm Aparatur Bappeda Kabupaten Maros		1	Peningkatan Upaya Pengembangan Karir Dan Kompetensi SDM Aparatur ASN Bappeda Kabupaten Maros, Baik Struktural Maupun Fungsional
							2	Peningkatan Kerjasama Diklat SDM Perencana Dengan Lembaga Diklat

					3	Penegakan Disiplin Dan Kode Etik ASN Di Lingkungan Bappeda	
				5		1	Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program Dan Kegiatan Aparatur Bappeda
						2	Peningkatan Pengadaan Perangkat IT Pendukung Aplikasi Perencanaan Pembangunan
				6	Meningkatkan Kualitas Layanan Perkantoran Lainnya Yang Mendukung Terciptanya Kondisi Kerja Yang Kondusif	1	Pengelolaan Administrasi Pimpinan, Urusan Rumah Tangga, Sarana Dan Prasarana Perkantoran, Arsip, Persuratan, Keamanan Dalam, Serta Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel	1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	1	Meningkatkan Kualitas Dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan
						2	Peningkatan Kerjasama Dengan Lembaga Perguruan Tinggi Pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Skala Makro
				2	Mensinergikan Alokasi Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Kemampuan Keuangan Daerah	1	Pengintegrasian E-Planning Dan E-Budgetting
						2	Penerapan Metode Pohon Program Dan KAK Berbasis Eselon IV
				3	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan	1	Peningkatan Data Pembangunan Yang Diverifikasi, Divalidasi Dan Dianalisis
						2	Peningkatan Evaluasi Kesesuaian RKPD Terhadap RPJMD
3	Peningkatan Evaluasi Pencapaian Sasaran RKPD Terhadap RPJMD						

				Pembangunan Serta Pelaksanaan Monitoring Terhadap Kegiatan Pembangunan, Baik Yang Akan Berjalan, Sedang Berjalan Maupun Telah Berjalan	4	Peningkatan Koordinasi Dan Verifikasi Perencanaan Bidang/Sektoral
					5	Peningkatan Evaluasi Dokumen Renja OPD
					6	Peningkatan Evaluasi Kontribusi Kinerja Program/ Kegiatan Terhadap Target Pemerintah Daerah
					7	Peningkatan Pemantauan, Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun (tahun 2020) dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sebagaimana Renstra Bappeda tahun 2016 - 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2020 merupakan perjanjian kinerja dalam suatu rangkaian proses untuk pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Maros pada tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen
		Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100 Persen

		Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100 Persen
		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Program Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	382.712.700,-
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	477.525.800,-
3	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah	239.894.000,-
4	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Dan SDA	157.175.000,-
5	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	53.610.000,-
6	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	69.285.000,-
7	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah	522.497.500,-
8	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Wilayah Dan Pengembangan Kawasan	79.700.000,-
TOTAL ANGGARAN (Rp)		1.982.400.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda Tahun 2020 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Bupati Maros. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan capaian kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$: Sangat Baik

$70 < X < 85$: Baik

$55 < X < 70$: Cukup Baik

$X < 55$: Tidak Baik

3.1.1. TARGET DAN REALISASI TAHUN RENCANA

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Maros dalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016 - 2021. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda;
2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel;

Untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap kedua sasaran tersebut, maka setiap sasaran strategis memiliki indikator yang disertai dengan target kinerja masing-masing. Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan pencapaian terhadap sasaran dan indikator kinerja setiap sasaran :

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda.
 - 1.1 Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1. Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda maka dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan tolok ukur Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda dengan target kinerja 0,00 Persen. Formulasi pengukuran dari indikator kinerja tersebut adalah: Jumlah Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda Dibagi Dengan Jumlah Anggaran Bappeda Dikali Seratus Persen.
 - 1.2 Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda

Pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Yang Dilakukan Pada lingkup Bappeda Kabupaten Maros dengan mengikuti kaidah dan aspek penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan pada Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 1.3 Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"

Sasaran Kinerja Pegawai merupakan dokumen penilaian kinerja setiap pegawai yang berisi target dan capaian kinerja setiap pegawai. Penilaian sikap dinilai oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai. Formulasi pengukuran dari indikator kinerja tersebut adalah: Jumlah PNS Dengan Nilai SKP "Baik" Dibagi Dengan Jumlah PNS Bappeda Dikali Seratus Persen.
 - 1.4 Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan.

Penilaian dilakukan dengan metode survey secara internal yang dibentuk oleh Kepala Bappeda. Survey Dilakukan untuk mengukur tanggapan pegawai pada Bappeda terhadap pelayanan kesekretariatan. Jumlah seluruh target responden adalah seluruh pegawai Bappeda yang terdaftar masih aktif dalam daftar kepegawaian Bappeda, tidak termasuk cuti dan tugas belajar.

Untuk pencapaian kinerja pada sasaran 1: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.1.1.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2021)	Capaian s/d 2020 Terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	-	A	B	Baik	A	B
3	Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	-	3,00	3,00	100%	100%	100%

2. Sasaran 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel.

2.1 Indikator Kinerja: Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan tolok ukur tingkat

Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Pembangunan Tingkat OPD. Tolok ukur tersebut memiliki target kinerja adalah 100 persen. Formulasi pengukuran dari indikator kinerja tersebut adalah: Jumlah Program Dan Sasaran Pembangunan OPD Dibagi Jumlah Program Dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD Dikali Seratus Persen. Pengukuran tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian program dan sasaran pembangunan OPD yang dilaksanakan pada tahun rencana (n) dengan program dan sasaran pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tahun rencana (N).

Jumlah program pembangunan OPD yang terdapat dalam RPJMD dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 142 Program, sehingga $100\% = 142$ program. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengukuran terhadap realisasi yang telah dicapai pada tahun 2020 dengan menggunakan formulasi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sehingga perumusan capaian kinerja dari tingkat keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana kerja kerja OPD adalah:

$142 \text{ program} / 142 \text{ program} \times 100\% = 100 \text{ Persen.}$

2.2 Indikator Kinerja : Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD

Program dan sasaran Renja OPD yang berkesesuaian dan pada program dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD. Formulasi pengukuran dari indikator kinerja tersebut adalah: Jumlah Renja OPD Yang Sesuai Dengan RKPD Dibagi Dengan Jumlah OPD Yang Memiliki Renja Dikali Seratus Persen.

2.3 Indikator Kinerja: Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi.

Pengukuran terhadap capaian kinerja pada indikator kinerja Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi ditargetkan sebesar 100 persen, yang artinya diharapkan terdapat 100 persen OPD dari 45 OPD atau sama dengan 40 OPD yang memiliki pencapaian kinerja 100 persen sesuai dengan target masing – masing OPD. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara menilai persentase program dan

sasaran pembangunan OPD yang berkesesuaian dan berkontribusi pada program dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJMD periode 2016 – 2021.

2.4 Indikator Kinerja: Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti.

Program dan sasaran pembangunan OPD yang direkomendasi hasil pengendalian yang ditindaklanjuti dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Yang Dikeluarkan Dikali Seratus Persen.

Untuk pencapaian kinerja pada sasaran 2, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan perbandingan antara target kinerja dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2021)	Capaian s/d 2020 Terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan realisasinya.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Maros.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja Yang Dilakukan Mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan

demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1.3
Capaian Kinerja Sasaran Dan Program Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020

NO.	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	100 Persen	100 Persen
2		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen	100 Persen
3	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen
4		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Dan SDA	100 Persen	100 Persen
5		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	100 Persen	100 Persen
6		Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	100 Persen	100 Persen
7		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah	100 Persen	80 Persen
8		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Wilayah Dan Pengembangan Kawasan	100 Persen	100 Persen

Tabel 3.1.1.4
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN				100 Persen
1	1	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100 Persen
1	2	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	9 Layanan	9 Layanan	100 Persen
1	3	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
1	4	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen
1	5	Pengendalian Kegiatan OPD	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen
1	6	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	44 Orang	44 Orang	100 Persen
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERJA APARATUR				100 Persen
2	1	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	100 Persen
2	2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	100 Persen
2	3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen
2	4	Rehabilitasi Ruang Kantor	1 Unit	1 Unit	100 Persen
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH				100 Persen
3	1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
3	2	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
3	3	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Perubahan)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
3	4	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	15 Dokumen	15 Dokumen	100 Persen

3	5	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan DAK Fisik	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
3	6	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
3	7	Pengelolaan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
3	8	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Penerapan SPM	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
3	9	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
3	10	Implementasi E- Planning	1 Sistem	1 Sistem	100 Persen
3	11	Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM				100 Persen
4	1	Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
4	2	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen
4	3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen
4	4	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sektor Ekonomi Dan SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
4	5	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA				100 Persen
5	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya	11 Dokumen	11 Dokumen	100 Persen
5	2	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen

5	3	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
5	4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya	0	0	0
5	5	Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)				100 Persen
6	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen
6	2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Persen
6	3	Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
6	4	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH				80 Persen
7	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen
7	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah	1 Dokumen	1Dokumen	100 Persen
7	3	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
7	4	Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)	1 Dokumen	-	0,00 Persen
7	5	Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan	103 Kelurahan Dan Desa	103 Kelurahan Dan Desa	100 Persen

8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN				100 Persen
8	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
8	2	Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
8	3	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
8	4	Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
8	5	Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
8	6	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
8	7	Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	0	0	0

3.1.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Pengukuran terhadap pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Maros sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda periode 2016 – 2021, dilakukan setiap tahun. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang perbandingan capaian kinerja setiap tahunnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Maros setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja setiap tahunnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					SATUAN
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen
	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	C	CC	B	BB	A	C	C	B	B	B	Nilai SAKIP
	Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
	Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nilai Survey
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
	Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPDP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
	Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen

Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Berdasarkan uraian tabel diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pencapaian target kinerja setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam hal realisasi capaian walaupun belum sepenuhnya memenuhi target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Maros periode 2016 – 2021.

3.1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI

Pada beberapa indikator kinerja sasaran, yaitu : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda dan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi dan Akuntabel, capaian target hingga tahun 2020 berhasil memenuhi target Renstra. Hal tersebut Nampak dari tabel 3.1.2.1, dimana capaian target setiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai angka sebesar 100 persen. Kondisi tersebut tentu sangat memuaskan, akan tetapi namunpun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perbaikan – perbaikan untuk lebih menyempurnakan kondisi pencapaian pada tahun – tahun berikutnya.

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Kebhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian target kinerja, faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun dari eksternal. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dibutuhkan suatu tindakan Evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan

tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Capaian yang tergolong tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

- a) Adanya dukungan pendanaan baik yang bersumber dari dana di luar APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari APBD Kabupaten itu sendiri terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- b) Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang menggunakan metode pohon program dan kerangka acuan kegiatan berbasis eselon IV;
- c) Adanya sistem informasi e-planning dan e-budgetting yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan OPD.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

- a) Kurangnya SDM Perencana pada setiap OPD;
- b) Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
- c) Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan;
- d) Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah dibuat;
- e) Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
- f) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g) Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung perencanaan yang lebih berkualitas.
- h) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- i) Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan rencana pembangunan.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah:

- a. Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana, utamanya untuk ditempatkan pada setiap OPD;
- b. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian pada setiap OPD;
- c. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD;
- d. Perbaikan terhadap ketersediaan dan kualitas data, utamanya data yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- f. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis wilayah dan kawasan (spasial).

3.1.5. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Sumber daya aparatur yang ideal di Bappeda Kabupaten Maros berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) berjumlah 65 orang ASN, akan tetapi hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 44 orang ASN sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang dengan status ASN. Disamping hal tersebut SDM aparatur Bappeda Kabupaten Maros yang berposisi sebagai tenaga Fungsional Perencana belum ada sehingga berakibat kepada kualitas rencana pembangunan yang disusun setiap tahunnya.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Bappeda Kabupaten Maros.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya anggaran yang tersedia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.982.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.531.950.765,- atau 77,28 persen.

3.1.6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

Bappeda Kabupaten Maros mempunyai 8 Program dan 48 Kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran dampak Pandemi Covid-19 sehingga hanya 44 kegiatan yang terlaksana di tahun 2020. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

A. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda

1. PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran
3. Keguatan Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan
4. Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD
5. Kegiatan Pengendalian Kegiatan OPD
6. Kegiatan Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERJA APARATUR

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
4. Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kantor

B. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi dan Akuntabel

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2025
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)
4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA - PPAS Perubahan)
5. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dak Fisik
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

8. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan
 9. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Penerapan SPM
 10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 11. Kegiatan Implementasi E – Planning
 12. Kegiatan Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
 1. Kegiatan Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha
 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA
 3. Kegiatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sektor Ekonomi dan SDA
 4. Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan SDM
 5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
 3. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
 1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya
 2. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
 3. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 4. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya
 5. Kegiatan Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya
 4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
 1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM

2. Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM
3. Kegiatan Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
4. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA
5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
 1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah
 2. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah
 3. Kegiatan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
 4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)
 5. Kegiatan Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan
6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN
 1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan
 2. Kegiatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
 4. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan
 5. Kegiatan Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah
 6. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi
 7. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2020, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Bappeda Kabupaten Maros. Namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.531.950.765,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.982.400.000,- dengan realisasi 77,28 persen. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel.3.2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN		382.712.700	344.557.765	90%
1	1	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	205.547.700	201.576.015	98%
1	2	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	177.165.000	142.981.750	81%
1	3	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	0	0	0%
1	4	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	0	0	0%
1	5	Pengendalian Kegiatan OPD	0	0	0%
1	6	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	0	0	0%

2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERJA APARATUR		477.525.800	472.670.000	99%
2	1	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100%
2	2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	356.565.800	354.609.000	99%
2	3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	51.960.000	49.710.000	96%
2	4	Rehabilitasi Ruangan Kantor	60.000.000	59.351.000	99%
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH		239.894.000	207.194.000	86%
3	1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	42.507.000	40.857.000	96%
3	2	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupten Maros Tahun 2021-2025	0	0	0%
3	3	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)	13.000.000	13.000.000	100%
3	4	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Perubahan)	12.250.000	10.250.000	84%
3	5	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	51.482.000	35.032.000	68%
3	6	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan DAK Fisik	3.990.000	3.990.000	100%
3	7	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD)	14.900.000	14.900.000	100%
3	8	Pengelolaan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	19.380.000	19.380.000	100%
3	9	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Penerapan SPM	3.885.000	3.885.000	100%
3	10	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	24.200.000	22.700.000	94%
3	11	Implementasi E- Planning	41.400.000	31.800.000	77%
3	12	Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	12.900.000	11.400.000	88%

4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM		157.175.000	157.175.000	100%
4	1	Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha	5.000.000	5.000.000	100%
4	2	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA	2.175.000	2.175.000	100%
4	3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia	15.000.000	15.000.000	100%
4	4	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sektor Ekonomi Dan SDA	5.000.000	5.000.000	100%
4	5	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	130.000.000	130.000.000	100%
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA		53.610.000	33.775.000	63%
5	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya	3.100.000	3.100.000	100%
5	2	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	19.950.000	14.175.000	71%
5	3	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	20.050.000	11.900.000	59%
5	4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya	0	0	0%
5	5	Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya	10.510.000	4.600.000	44%
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)		69.285.000	59.325.000	86%
6	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM	4.950.000	4.890.000	99%

6	2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM	0	0	0%
6	3	Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	24.425.000	20.125.000	82%
6	4	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA	39.910.000	34.310.000	86%
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH		522.497.500	178.054.000	34%
7	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	4.120.000	2.000.000	49%
7	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah	16.425.000	10.335.000	63%
7	3	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	363.033.500	40.100.000	11%
7	4	Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)	5.000.000	1.000.000	20%
7	5	Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan	133.919.000	124.619.000	93%
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN		79.700.000	79.200.000	99%
8	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	1.900.000	1.900.000	100%
8	2	Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	8.500.000	8.000.000	94%
8	3	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	61.200.000	61.200.000	100%

8	4	Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	1.500.000	1.500.000	100%
8	5	Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	5.600.000	5.600.000	100%
8	6	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	1.000.000	1.000.000	100%
8	7	Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	0	0	0%
		TOTAL	1.982.400.000	1.531.950.765	77,28%

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi anggaran belanja langsung berada di atas 70 persen, hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran relatif baik meskipun ada refocusing anggaran dampak pandemi covid-19.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2020, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LAKIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Maros.

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya sebagian capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2020 telah tercapai. Namun untuk diketahui bahwa mulai pada tahun rencana tersebut (Tahun 2020) telah mengacu pada dokumen perencanaan yang berbeda yakni RPJMD Perubahan Tahun 2016 - 2021 dan Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021 sehingga terjadi perubahan pula pada perencanaan khususnya terkait Indikator Kinerja Utama serta beberapa program dan kegiatan. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Maros ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian dari sistem perencanan pembangunan. Namun demikian peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan.